

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

*One Belt One Road (OBOR)* atau juga disebut *Belt Road Initiative (BRI)* merupakan sebuah kebijakan yang dibuat oleh Presiden China Xi Jin Ping pada 2013. Di mana kebijakan ini merupakan sebuah proyek yang berfokus pada koordinasi kebijakan, memfasilitasi kebijakan, perdagangan tanpa hambatan, integrasi keuangan dan ikatan antar masyarakat. (Han, 2020) Myanmar yang terletak di Asia Tenggara menarik perhatian China untuk keberlangsungan proyek *One Belt One Road (OBOR)*. Di mana Myanmar memiliki wilayah yang strategis yang bisa menghubungkan Provinsi Yunnan di China dengan Samudra Hindia. Provinsi Yunnan di China ini merupakan daratan yang buntu dan jika China bisa menggunakan pelabuhan Kyaukpyu, ini bisa memangkas jarak sebanyak 5.000 km bagi China untuk bisa mengakses Kawasan Asia Selatan, Asia Barat, Afrika dan Eropa. (Gyi, 2019) Bagi Myanmar sendiri dengan adanya proyek ini bisa meningkatkan perekonomian dan menyediakan banyak lapangan pekerjaan. Proyek *One Belt One Road (OBOR)* ini sendiri sudah berlangsung sejak tahun 2018 di Myanmar dengan ditandai adanya tanda tangan *Memorandum of Understanding (MOU)* yang menyetujui dibangunnya *China-Myanmar Economic Corridor (CMEC)* yang merupakan bagian dari *One Belt One Road (OBOR)* China. (Gyi, 2019) 4 proyek utama *One Belt One Road (OBOR)*

di Myanmar antara lain adalah Pelabuhan Kyauk Phyu, Jalur kereta api Muse-Mandalay, Tiga Zona Ekonomi di Negara bagian Shan dan Kachin dan proyek pengembangan kota yangon baru.

Seiring dengan berjalannya waktu, investasi China ke Myanmar makin bertambah. Dari tahun 2004 hingga tahun 2015. Pada tahun 2011, investasi China ke Myanmar sedikit terhambat karena adanya krisis yang diakibatkan adanya pembangunan bendungan Myitsone pada pemerintahan Presiden Thein Sein. Adanya transisi politik di Myanmar juga membuat hambatan bagi investasi China ke Myanmar. Posisi investor terbesar di Myanmar kemudian diraih oleh Singapura dan Myanmar juga mendapatkan banyak investasi dari negara-negara lainnya seperti Inggris, Jepang dan Korea Selatan setelah sanksi ekonominya dicabut. Namun, tetap saja investasi China ke Myanmar jumlahnya mengalahkan jumlah investasi negara-negara tersebut ke Myanmar. Jumlah investasi China ke Myanmar berjumlah mencapai \$18.529.301 juta. (Arduino & Gong, 2018) Myanmar di antara negara-negara anggota ASEAN lainnya merupakan negara yang tertinggal dalam hal fasilitas dan infrastruktur negaranya. Dalam hal ini tentu membuat terhambatnya perkembangan industri maupun perdagangan yang ada di Myanmar. Investasi akan sangat cocok dengan Myanmar, ketika negara lain tidak ingin berinvestasi ke negara yang tidak memenuhi standar. China juga senang untuk berinvestasi ke negara yang ditutup aksesnya oleh negara-negara maju lainnya. Dalam hal ini Myanmar terisolasi dari negara-negara Barat, sehingga membuat negara-negara Barat tidak mau berinvestasi di Myanmar. Dengan adanya investasi China

di Myanmar, tentu ini akan membantu perkembangan dan pembangunan yang ada di Myanmar dan nantinya akan membantu masyarakat di Myanmar untuk bisa mengakses fasilitas dan infrastruktur.

Dengan adanya program *One Belt One Road (OBOR)* yang dibentuk oleh Presiden China, Xi Jinping. Myanmar masuk ke dalam proyek jalur sutra China tersebut. Myanmar menyambut baik adanya program *One Belt One Road (OBOR)* itu, Myanmar menganggap adanya *One Belt One Road (OBOR)* ini merupakan cara untuk Myanmar dan China bisa berbagi keuntungan bersama. Setelah berjalannya program ini, daerah pesisir China berhasil berkembang pesat. Myanmar yang merupakan negara dengan luas wilayahnya lebih dari 670,000 km dan populasinya lebih dari 51 juta jiwa, Myanmar kaya akan sumber daya alamnya. Tentu ini membuat Myanmar menjadi destinasi yang cocok untuk perusahaan-perusahaan China dalam berinvestasi. Walaupun hubungan perdagangan China dan Myanmar hanya menyumbang sedikit perekonomian China, namun *One Belt One Road (OBOR)* di Myanmar ini memberikan dampak yang baik untuk China daerah barat daya khususnya Yunnan. (Chenyang & Shaojun, 2018)

Dengan proyek *One Belt One Road (OBOR)* ini China berambisi untuk bisa membuat jalur perdagangan yang strategis. Jika jalur darat, air oleh China-Myanmar dan jalur kereta api Kunming-Kyauk Phyu berhasil dibangun, seperti jalur pipa minyak dan gas antara China-Myanmar, maka Myanmar akan menjadi jembatan yang menghubungkan China dengan Asia Selatan, Eropa dan Afrika. Myanmar dan China saling melengkapi dalam

hubungan perekonomian. Ekspor China ke Myanmar berupa produk mekanik, suku cadang mobil dan produk manufaktur sedangkan impor China dari Myanmar berupa sumber daya alam seperti mineral, produk pertanian dan produk perikanan. Hubungan dagang antara Myanmar dan China juga semakin tahun semakin tumbuh pesat. Menurut data dari kementerian perdagangan China, pada tahun 2011, 2012 dan 2013 tingkat pertumbuhan per tahunnya adalah masing-masing 73,2%, 1,8% dan 35,6%. (Chenyang & Shaojun, 2018)

Saat ini keadaan politik dalam negeri Myanmar sedang tidak stabil. Ini diakibatkan adanya kudeta militer yang dilakukan oleh militer yang dipimpin oleh Min Aung Hlaing di mana mereka menahan Kanselir Myanmar, Aung San Suu Kyi dan Presiden Myanmar, Win Myint. Penangkapan itu dilakukan pada tanggal 1 Februari 2021 dini hari. Kudeta militer ini dilakukan karena adanya rasa kecewa dari militer akibat kekalahannya pada pemilu yang diselenggarakan di Myanmar pada November 2020 yang memenangkan *National League for Democracy (NLD)*. (Kipgen, 2021) Pemilu itu dilaksanakan di Myanmar pada November tahun 2020. Ini bukan pertama kalinya bagi Myanmar untuk mengalami kudeta militer. Tahun 2021 merupakan ketiga kalinya Myanmar di kudeta oleh militer. Kudeta militer pertama yang dialami Myanmar adalah pada tahun 1962 setelah 14 tahun negara ini bebas dari penjajahan Inggris. Kudeta militer ini terjadi karena adanya kekhawatiran dari militer bahwa pemerintahan sipil tidak bisa memimpin negara tersebut dari gerakan etnis minoritas.

Kudeta militer yang kedua terjadi pada tahun 1988. (Sorongan, 2021) Kudeta militer ini masih lanjutan dari kudeta militer yang pertama dan pada tahun itu muncul demonstran yang besar-besaran akibat militer dianggap sudah terlalu banyak melakukan korupsi yang membuat perekonomian menurun. Pada tahun 2021 merupakan kudeta militer yang ketiga, di mana terjadi akibat adanya kekecewaan militer terhadap hasil pemilu yang memenangkan *National League for Democracy (NLD)*. Akibat adanya kudeta militer ini, sudah lebih dari 400 nyawa manusia dikorbankan. (Kudeta Myanmar: 107 warga sipil tewas 'dibantai' dalam sehari, para jenderal berpesta-Presiden AS : Benar-benar keterlaluhan, 2021) Militer melakukan penembakan di berbagai kota di Myanmar. Bahkan militer juga masuk ke pemukiman warga dan menembaki warga tanpa ada alasan. Negara-negara di dunia mengancam aksi yang dilakukan oleh militer Myanmar karena dianggap melanggar hak asasi manusia.

Dengan adanya gejolak politik dalam negeri yang terjadi di Myanmar membuat China sedikit khawatir akan investasinya di Myanmar dan juga program *One Belt One Road (OBOR)*. Adanya pandemi covid-19 juga menghambat pembangunan infrastrukturnya di bawah kerangka *China-Myanmar Economic Corridor (CMEC)*. Adanya kudeta militer ini juga meningkatkan gerakan anti-China di Myanmar, di mana mereka melakukan protes di depan kantor kedutaan China di Yangon dan tempat-tempat fasilitas China di Myanmar. (Tower & Clapp, 2021) Pabrik-pabrik perusahaan China di Myanmar juga menjadi sasaran mereka karena gerakan anti-China ini menganggap bahwa China bersekutu

dengan militer Myanmar dan memberikan bantuan kepada mereka dalam melakukan kudeta. Akibatnya banyak orang-orang China di sana kembali ke China untuk menyelamatkan diri. Hal ini menjadi mimpi buruk bagi Presiden Xi Jinping terkait tujuannya dalam proyek *One Belt One Road (OBOR)*. China dan Myanmar sendiri sudah banyak melakukan perjanjian terkait pembangunan infrastruktur di Myanmar. Namun, dengan terjadinya kudeta militer ini para pejabat tinggi Myanmar yang melakukan hubungan dengan China ditangkap dan militer membiarkan rencana pembangunan China di Myanmar tersebut. (Tower & Clapp, 2021) Jika China terus memberanikan diri untuk tetap melakukan investasi di Myanmar walaupun dengan adanya gejolak politik internal yang sedang terjadi, tentu investasi China di Myanmar bisa terancam.

### **B. Rumusan Masalah :**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat ditarik rumusan masalah, yaitu : Bagaimana pengaruh kudeta militer di Myanmar tahun 2021 terhadap kemajuan program *One Belt One Road (OBOR)* China di Myanmar?

### **C. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran dijadikan sebagai alat untuk dapat menjelaskan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam kerangka pemikiran ini menjadi cara untuk menjelaskan pengaruh kudeta militer di Myanmar tahun 2021 terhadap kemajuan program *One Belt One Road (OBOR)* China di Myanmar dengan menggunakan Teori Kudeta Militer.

## **1. Teori Kudeta Militer**

Kudeta militer adalah sebuah kegiatan yang direncanakan dan dilakukan dengan sengaja dengan tujuan dan maksud tertentu. Dengan sudah mempertimbangan kemungkinan dana dan resikonya. Kudeta ini dilakukan oleh kelompok tertentu atau kelompok militer di negara tertentu. Alasan militer melakukan kudeta ini karena menganggap adanya kegagalan pemerintahan sipil dan kehilangan keabsahan dalam memimpin negaranya. Paramiliter ini akan menghalalkan berbagai cara untuk melakukan kudeta terhadap pemerintahan sipil yang dianggapnya lemah. (Nordlinger, 1990)

Demi bisa mempertahankan kepentingan para kelompok militer ini, mereka rela melakukan kudeta terhadap pemerintahan sipil. Setelah kudeta, pihak militer menegaskan bahwa tindakan mereka merupakan cara untuk bisa mempertahankan kepentingan umum dari kelemahan pemerintahan sipil. Padahal sudah terlihat jelas bahwa mereka hanya mempertahankan kepentingan militer dan dalam proses kudeta mereka melakukannya dengan banyak melanggar norma dan peraturan undang-undang. Paramiliter ini juga mengidentifikasikan dirinya sebagai negara dan negara sebagai militer. Sehingga kudeta ini dilakukan untuk negara. Mereka juga menganggap bahwa kedaulatan dan kekuatan negara ada di angkatan bersenjata. Sehingga mereka melakukan berbagai cara sekalipun menggunakan kekerasan untuk bisa melindungi kepentingan mereka. (Nordlinger, 1990)

Namun seringkali ada suatu hal yang bisa menghalangi kepentingan militer ini, yaitu adanya kesadaran politik di kalangan bawah. Dengan adanya kesadaran politik pada kelas bawah, ini menjadi kekuatan pada saat diadakannya pemilihan umum. Dengan begitu, pihak militer akan lebih sering menghalangi kegiatan pemilihan umum atau menganggap hasil dari pemilihan umum tidak sah. Kudeta yang dilancarkan paramiliter ini memang bisa disebut sebagai pelanggaran karena mereka berusaha untuk bisa menggulingkan pemerintahan yang sah. Akibatnya mereka banyak mendapatkan kecaman dari warga sipil atau mendapatkan citra yang buruk di mata warga sipil. Seperti contohnya dengan adanya kudeta ini akan memicu adanya aksi-aksi unjuk rasa, pemogokan umum, demonstrasi atau bahkan konflik bersenjata yang dilakukan oleh warga sipil. Namun walaupun demikian militer tidak peduli karena menganggap dirinya melakukan hal tersebut demi terwujudnya kepentingan bersama. (Nordlinger, 1990)

Pendapat lainnya yang diungkapkan oleh Ozan O. Varol mengenai kudeta. Dia menyebut kudeta dengan sebutan kudeta demokratik. Artinya adalah merupakan sebuah pengecualian, bukanlah norma. Setelah kudeta demokratik, militer sementara waktu mengambil alih kekuasaan pemerintahan sampai dengan diadakannya pemilu untuk pemilihan pemimpin selanjutnya. Jenis kudeta ini biasanya menampilkan 7 atribut yaitu :

1. kudeta militer dilakukan terhadap rezim otoritarian dan totalitarian,

2. militer menanggapi oposisi rakyat terhadap rezim,
3. pemimpin otoritarian atau totalitarian menolak untuk menanggapi oposisi rakyat,
4. kudeta dilakukan oleh militer yang dihormati di dalam negara,
5. militer melakukan kudeta untuk menyingkirkan rezim otoritarian atau totalitarian,
6. militer memfasilitasi pemilu bebas dan jujur dalam jangka waktu yang singkat,
7. kudeta berakhir dengan adanya pemindahan kekuasaan kepada pemimpin yang dipilih secara demokratis. (Varol, 2012)

Adapun faktor-faktor yang menentukan keberhasilan dari adanya suatu kudeta. Menurut Nordlinger ada 3 faktor yang menentukan keberhasilan dari suatu kudeta. Yang pertama adalah adanya keterlibatan aktif dari perwira untuk bisa menduduki tempat-tempat strategis. Adanya kesetiaan dan kepatuhan dengan pimpinan membuat pasukan militer akan cepat dapat menguasai keadaan. Yang kedua adalah dengan adanya jumlah pasukan yang banyak maka keberhasilan kudeta akan semakin tinggi. Yang ketiga adalah pentingnya koordinasi dari pelaksana kudeta. Setelah kudeta berhasil dilakukan, maka para pemimpin kudeta ini menyebarkan legitimasinya kepada para masyarakat negara maupun masyarakat luar negeri. (Nordlinger, 1990)

Kudeta militer yang terjadi di Myanmar dinilai berhasil jika dilihat dari faktor-faktor yang sudah disebutkan diatas. Kudeta militer di Myanmar berhasil

menggulingkan pemerintahan sipil dan diambil alih oleh militer. Mereka juga menangkap pejabat-pejabat sipil yang ada di Myanmar dan banyak negara-negara luar berusaha memberikan bantuan untuk menghentikan adanya kudeta militer yang terjadi di Myanmar. Kudeta di Myanmar sendiri terjadi karena adanya ketidakpuasan militer atas hasil pemilu yang dimenangkan oleh *National League for Democracy (NLD)*. Dengan adanya keberhasilan militer menggulingkan kekuasaan ini juga menimbulkan berbagai dampak terhadap masyarakat sipil. Mulai dari gerakan massa yang menolak kudeta militer dan meminta militer membebaskan para tahanan sipil. Masyarakat sipil juga terlibat aksi konflik bersenjata dengan militer dan banyak menelan korban jiwa. Muncul juga gerakan anti China yang menganggap bahwa China mendukung kudeta militer yang terjadi sehingga banyak fasilitas-fasilitas pabrik China di Myanmar menjadi sasaran para gerakan anti China ini.

#### **D. Hipotesis**

Kudeta militer di Myanmar tahun 2021 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemajuan program One Belt One Road (OBOR) China di Myanmar.

#### **E. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan *library research*, di mana dengan mengumpulkan data dari internet, buku, jurnal, artikel, karya ilmiah dan skripsi yang berhubungan dengan penelitian ini. Kemudian dari data yang sudah terkumpul, penulis

menganalisa dengan cara menganalisis data dengan mencari fakta-fakta yang ada yang sesuai dengan permasalahan mengenai kudeta militer di Myanmar dan Program *One Belt One Road (OBOR)* China di Myanmar.

#### **F. Jangkauan Penelitian**

Untuk membatasi penelitian ini tetap pada topik pembahasan, penulis menentukan jangkauan penelitian ini pada saat terjadinya kudeta militer di Myanmar tahun 2021. Dengan melihat juga apa saja faktor yang melatarbelakanginya. Sedangkan program *One Belt One Road (OBOR)* China di Myanmar juga sudah berlangsung dari tahun 2018. Oleh karena itu, dibutuhkan juga data dari program *One Belt One Road (OBOR)* China di Myanmar sejak 2018 hingga saat ini. dilihat bagaimana perubahannya sebelum adanya kudeta militer dan setelahnya.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang direncanakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Bab I** mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitian, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II** akan membahas mengenai kebijakan pemerintah China tentang *One Belt One Road (OBOR)*. Dimana kebijakan ini dibentuk pada tahun 2013 yang bertujuan untuk bisa mengintegrasikan ekonomi di benua Asia, Eropa

dan Afrika. *One Belt One Road (OBOR)* ini melewati banyak negara dan salah satunya adalah Myanmar di Kawasan Asia Tenggara.

**BAB III** membahas mengenai Kudeta Militer di Myanmar pada 2021. Kudeta Militer ini dilakukan oleh militer karena mereka tidak terima akan hasil pemilu yang dimenangkan oleh *National League for Democracy (NLD)*. Militer merasa bahwa pemilihan umum dilakukan dengan banyaknya kecurangan. Pada 1 Februari 2021 Militer melakukan kudeta militer dengan menangkap para pejabat tinggi di Myanmar.

**BAB IV** menjelaskan bagaimana pengaruh kudeta militer terhadap program *One Belt One Road (OBOR)* di Myanmar. Dengan adanya kudeta militer di Myanmar menimbulkan adanya gerakan anti-China di masyarakat Myanmar. Gerakan ini menuduh China mendukung militer melakukan kudeta. Pabrik-pabrik China di serang gerakan anti-China ini. Hal ini membuat China merasa khawatir akan keberlangsungan proyek *One Belt One Road (OBOR)* nya di Myanmar.

**BAB V** merupakan penutup untuk menyimpulkan isi dari hasil penelitian.